

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*). Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17/2003 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah di minta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada 2015. Dengan demikian pada saat ini merupakan masa penerapan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat yang merupakan peraturan turunan dari PP No. 71/2010 menimbulkan optimisme baru dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang sejalan dengan Standar Akuntansi Sektor Publik yang diterima secara internasional,

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Departemen atau Lembaga non Departemen.

Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan instansi pemerintah, dalam hal ini Lembaga. Laporan keuangan kementerian/kelembagaan adalah bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (satker) dengan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dan dalam hal ini satuan kerja diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada KPPN pada setiap periode akuntansi yang telah ditentukan sebelumnya.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Terkait dengan penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual yang dimulai pada Tahun Anggaran 2015, maka untuk memudahkan pengelola APBN dan Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi computer berupa Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA merupakan modifikasi dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Tujuan dari pengembangan SAIBA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya & penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan negara berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan Akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Stasiun Meteorologi Maitim Teluk Bayur, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh hal tersebut terutama dalam hal pengakuan atas transaksi finansial yakni Pendapatan-LO dan Beban yang ada pada Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Akuntansi berbasis akrual telah diterapkan secara penuh (full accrual) pada Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur terutama pengakuan atas transaksi finansial Pendapatan-LO dan Beban.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas penerapan akuntansi berbasis akrual pada Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur yang telah menjalankan SAP berbasis Akrual berkaitan dengan pengakuan Pendapatan-LO dan Beban yang terdapat dalam Laporan Operasional Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur untuk periode tahun 2015.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan Akuntansi berbasis akrual pada Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur dalam hal pengakuan Pendapatan-LO dan Beban yang terdapat dalam Laporan Operasional Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dilakukan adalah:

1. Manfaat bagi Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur dalam penerapan Akuntansi berbasis akrual terutama pada pengakuan Pendapatan-LO dan Beban.

2. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini tidak hanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan sebagai bentuk tanggung jawab atas beasiswa yang telah diberikan oleh negara melalui STAR-BPKP, tapi hal yang penting bagi penulis adalah pemahaman dibidang ilmu Akuntansi Pemerintahan dan dapat lebih bermanfaat di instansi asal penulis.

1.1. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: berisi kajian teori yang berhubungan dengan topik bahasan dan review penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian: berisi desain penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: berisi hasil penelitian yang dilakukan dan bahasan data yang diperoleh dari penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran: berisi kesimpulan dari Bab IV dan saran untuk perbaikan atas kekkurangan-kekurangan yang ditemukan selama penelitian serta implikasinya bagi pengelolaan keuangan daerah.

